



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 3692-3703

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung)

Fajar Diantika<sup>1✉</sup>, Pandji Santosa<sup>2</sup>, Diani Indah<sup>3</sup>

Universitas Langlangbuana Bandung

Email: [diantikafajar@gmail.com](mailto:diantikafajar@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat dengan lokus Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung belum berjalan optimal, hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi kaitan kebijakan tersebut, kurangnya partisipasi masyarakat, dan masih rendahnya kualitas Sumber daya manusia di desa. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan hal-hal seperti pendekatan dengan masyarakat melalui pembangunan partisipatif dan juga meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana dari kebijakan sehingga percepatan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik dalam rangka mencapai desa maju dan mandiri.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Desa, Pembangunan Desa, Desa Mandiri*

## Abstract

The research conducted aims to comprehensively describe and provide recommendations from the results of the Village Development Movement Policy research in West Java with the locus of Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency. This research uses the Van Meter and Van Horn theory. This research method is a study that uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, it is known that the implementation of the Village Development Movement Policy in West Java Province, especially in Wargaluyu Village, Arjasari District, Bandung Regency has not been running optimally, this is due to the lack of socialization related to the policy, lack of community participation, and the still low quality of human resources in the village. For this reason, the Regional Government needs to pay attention to things such as approaches to the community through participatory development and also improving the quality of Human Resources as implementers of the policy so that the acceleration of village development can be carried out properly in order to achieve advanced and independent villages.

*Keywords: Policy Implementation, Village, Village Development, Self-Sufficient Village*

## PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Sejalan dalam pembangunan desa yang merupakan upaya yang didasari oleh prinsip-prinsip dasar kehidupan manusia dan alam yang berfokus pada perbaikan kualitas hidup masyarakat di desa dengan menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan lingkungan setempat yang berkeadilan sosial (Endah, 2020). Pembangunan desa harus didasarkan pada partisipasi aktif masyarakat, oleh karenanya bahwa dalam pelaksanaannya harus dilakukan strategi yang memandang bahwa desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi subjek yang harus aktif menentukan arah pembangunan itu sendiri, mampu menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desanya (Gea et al., 2022). Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan baru bagi desa dan masyarakat serta menghilangkan stigma bahwa desa yang selama ini terpinggirkan akan mampu sejajar dengan wilayah perkotaan (Permendes, 2020). Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka penguatan wilayah secara otomatis menyangga dan menyokong kehidupan suatu pemerintahan sehingga pembangunan desa menjadi bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Mujanah et al., 2022).

Pelaksanaan program pembangunan di desa harus mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yang mencakup dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan (Ariadi, 2019). Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan perdesaan di Jawa Barat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan, melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Alfiana et al., 2023). Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan dalam upaya percepatan pembangunan desa pada: 1) Pembangunan sarana dan prasarana desa; 2) Pengembangan potensi ekonomi lokal desa; dan 3) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Upaya di atas juga didukung melalui Program Gerakan Membangun Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan desa (Ismatulloh et al., 2021). Kebijakan ini dilaksanakan berdasarkan pertimbangan pada perolehan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Fatimah, 2021). Sebagai contoh lokasi pada penelitian ini, Desa Wargaluyu mendapatkan predikat strata desa berkembang dengan perolehan poin IDM sebesar 0,68. Perolehan poin IDM ini berdasarkan pada poin Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), Indeks Ketahanan Sosial (IKS) dan Indeks ketahanan Lingkungan (IKL).

Berdasarkan pada argumen tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung khususnya Program CEO BUMDes yang dikaitkan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal desa apakah sudah dijalankan bersama-sama dengan seluruh stakeholder yang ada di desa dalam mencapai tujuan yang sudah disepakati secara mufakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif serta memberikan rekomendasi dari hasil penelitian Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat dengan lokus Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan teori dan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn untuk mendapatkan analisis proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat khususnya di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. Penelitian lapangan dilakukan peneliti langsung mengadakan penelitian di lokasi penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara, observasi, wawancara, dokumentasi. Instrumen penelitian oleh peneliti sendiri sebagai orang yang melakukan penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung dengan informan yang telah ditentukan dan ditetapkan untuk mendapatkan jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti dalam mencari data. Teknik analisis data melalui tahap data reduction, data display, dan concluding drawing/verification (Sugiyono, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Membangun Desa atau selanjutnya disebut Gerbang Desa adalah upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri, yang mampu membangun dan memberdayakan masyarakat desa dengan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi desa, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kebijakan Gerakan Membangun Desa sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa, dilaksanakan dalam rangka upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dan diharapkan dapat mendukung upaya percepatan pembangunan desa di Jawa Barat sehingga terwujud desa maju dan mandiri (Ristantiya et al., 2021). Terdapat 12 program yang termasuk di dalam Kebijakan Gerakan Membangun Desa, untuk penelitian ini difokuskan terhadap pelaksanaan Program CEO BUMDes yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi lokal desa. *Chief Executive Officer* BUMDes (CEO BUMDes) merupakan upaya mengembangkan BUMDes berbasis karakteristik dan kebutuhan. CEO BUMDes juga merupakan konseptor perubahan manajemen BUMDes agar BUMDes mampu menjadi salah satu wujud kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa sesuai potensi desa yang dimiliki (Lewaherilla et al., 2022). CEO BUMDes mendayagunakan para Pendamping Lokal Desa (PLD).

-

- Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Ukuran dan tujuan juga merupakan indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Tujuan kebijakan yang jelas memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai pedoman untuk para pelaksana kebijakan agar dapat memahami apa yang harus dicapai dan bagaimana mencapainya. Apabila ukuran dan tujuan kebijakan tidak jelas maka akan menyebabkan kebingungan dan implementasi berjalan dengan tidak efektif (Korain et al., 2019). Adapun yang menjadi patokan dalam hal ini apakah Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya pada Program *Chief Executive Officer* (CEO BUMDes) di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung telah berjalan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Gerakan Membangun Desa.

- Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu elemen penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan. Ketiadaan sumber daya atau kurang optimalnya potensi sumber daya akan berakibat pada ketidakefektifan penerapan kebijakan itu sendiri. Kemampuan sumber daya dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi kebijakan (Sopah et al., 2020). Dalam kaitannya, manusia sebagai sumber daya yang memerlukan kompetensi dan kapabilitas yang mumpuni. Selain itu juga sumber daya finansial tentu tidak kalah penting dalam mendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan (Tay & Rusmiwari, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan aspek sumber daya manusia dan sumber daya finansial sebagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendampingan desa dalam upaya pembangunan ekonomi lokal desa. Dengan adanya dukungan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, keberhasilan dari proses implementasi kebijakan juga akan mudah tercapai.

- Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah salah satu dari enam dimensi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Agen pelaksana adalah lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik dan karakteristik agen pelaksana tersebut memainkan peran penting dalam efektivitas proses implementasi (Sekar Setyaningtyas et al., 2022). Karakteristik agen pelaksana sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai

dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks pelaksanaan kebijakan yang menuntut para agen pelaksana harus bekerja dengan ketat, disiplin serta mampu bersikap demokratis. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang diimplementasikan oleh agen pelaksana, dapat diketahui dalam mengimplementasikan Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya pelaksanaan Program CEO BUMDes, Pendamping Lokal Desa yang melaksanakan program tersebut mempunyai standar operasional dan juga *Key Performance Indicator* (KPI) yang harus dilaksanakan (Hussain et al., 2023). Sedangkan karakteristik yang ditampilkan oleh agen pelaksana terhadap seluruh stakeholder yang ada di desa harus selalu menunjukkan sikap bertanggung jawab, motivasi dan komitmen yang tinggi, serta ramah dan mampu beradaptasi dengan baik.

- Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Sikap atau kecenderungan para pelaksana (disposisi) adalah salah satu dimensi yang penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dimensi ini merujuk pada bagaimana sikap, orientasi serta komitmen individu atau kelompok yang bertanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri (Arabi, 2022). Sikap para pelaksana sangat mempengaruhi efektivitas implementasi karena penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan akan berdampak pada cara kebijakan itu dijalankan. Pelaksanaan suatu kebijakan atau program kadangkala bermasalah apabila pelaksana yang terkait di dalamnya tidak dapat menjalankan program dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan melaksanakan kebijakan atau program dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program juga tidak akan berjalan dengan efektif (Habibah et al., 2020). Disposisi akan menjelaskan kecenderungan pelaksana untuk bertindak dimana tindakan yang dilakukan ini merupakan bentuk sebuah komitmen yang harus dilaksanakan. Masalah utama yang biasanya dihadapi oleh sebuah organisasi pemerintah dalam implementasi kebijakan adalah sikap para pelaksananya.

- Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam proses implementasi kebijakan publik tentu menjadi syarat utama sebagai bagian yang menentukan keberhasilan. Semakin baik hubungan koordinasi dan komunikasi yang terjalin antar organisasi dan aktivitas pelaksana, maka ketepatan pelaksanaan implementasi akan semakin akurat (Kamil, 2018). Agar kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik, menurut Van Meter dan Van Horn, apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para

pelaksanaan implementasi yang bertanggung jawab atas pencapaian dan standar tujuan dari kebijakan, karena standar tujuan ini harus dapat dikomunikasikan dengan baik pula (Almeida et al., 2016). Sebagai bagian dari dimensi komunikasi antarorganisasi, kerja sama yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan di Desa Wargaluyu berjalan baik. Kerja sama ini memainkan peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan komunikasi yang efektif dan kolaborasi yang erat, berbagai lembaga dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan, mengatasi tantangan, dan meningkatkan kapasitas masing-masing.

- Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Dimensi terakhir yang tidak kalah penting dalam implementasi kebijakan yaitu kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dimensi ini menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan karena kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif dan mendukung, maka peran pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan tersebut akan berjalan sesuai dengan alur yang telah ditentukan. Tetapi apabila lingkungan sosial, ekonomi dan politik tersebut tidak kondusif, maka pelaksanaan kebijakan tentunya akan terhambat dan tidak akan berjalan secara optimal (Pujiastuti et al., 2022). Lingkungan sosial yang bersumber pada nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi penerimaan kebijakan. Jika kebijakan tersebut sejalan dengan nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat, maka implementasinya akan lebih mudah diterima dan didukung (Kenedi, 2017). Sebaliknya, jika kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai sosial, mungkin akan ada resistensi dari masyarakat. Kehidupan sosial yang stabil dan terorganisir mendukung pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Sebaliknya, jika ada ketidakstabilan sosial, seperti konflik atau ketegangan sosial, hal tersebut dapat mempersulit implementasi kebijakan. Lingkungan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas ekonomi, dapat mempengaruhi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan (Madjidi et al., 2022). Dalam kondisi ekonomi yang baik, biasanya lebih mudah untuk mengalokasikan sumber daya untuk kebijakan. Namun, dalam kondisi krisis ekonomi, anggaran dan sumber daya mungkin terbatas, yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya ekonomi, seperti dana, infrastruktur, dan akses terhadap pasar atau peluang ekonomi, juga mempengaruhi implementasi kebijakan (Arini, 2023). Jika agen pelaksana kekurangan dana atau sarana ekonomi, kebijakan sulit dijalankan secara efektif. Lingkungan politik yang dipengaruhi oleh stabilitas politik merupakan faktor kunci dalam implementasi kebijakan.

Pemerintahan yang stabil dan memiliki dukungan politik yang kuat lebih mampu melaksanakan kebijakan tanpa gangguan yang berarti.

Sesuai hasil observasi dan analisis diatas bahwa Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa belum berjalan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Desa Wargaluyu, ketercapaian sasaran kebijakan khususnya dari Program CEO BUMDes sudah dapat dikatakan berhasil namun masih terkendala dari kurangnya dukungan masyarakat. Para pelaksana kebijakan memiliki Standar Operasional Prosedur dan *Key Performance Indicator* yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan di lapangan namun masih terhambat dari dukungan masyarakat akibat masih kurangnya sosialisasi kaitan Kebijakan Gerakan Membangun Desa (Listyorini et al., 2021).
- Sumber Daya, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk aspek sumber daya finansial pada pelaksanaan Program CEO BUMDes ini sudah cukup terpenuhi dan tidak menjadi kendala yang berarti dalam implementasi kebijakan tersebut (Rosari et al., 2022). Selain itu, jika dilihat dari faktor kualitas sumber daya manusia, secara keseluruhan personil yang bertugas menjalankan Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu sudah memadai, tetapi masih terkendala pada kurangnya partisipasi masyarakat desa dimana unsur dukungan dari partisipasi masyarakat sedikit banyak mempengaruhi implementasi suatu kebijakan.
- Karakteristik Agen Pelaksana, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung keseluruhan kinerja dari agen pelaksana khususnya ada Program CEO BUMDes telah dijalankan sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Key Performance Indicator* (KPI) yang ditetapkan, sehingga segala bentuk kegiatan yang ada dalam upaya pembangunan perekonomian di desa berjalan dengan baik dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku (Ristanti, 2015).
- Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi), dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sikap para pelaksana kebijakan khususnya dalam Program CEO BUMDes sudah melaksanakan kinerja dengan baik dan totalitas terlihat dari dukungan masyarakat desa yang diberikan. Para pelaksana kebijakan

sudah memahami tujuan dari kebijakan yang dilaksanakan sehingga menghasilkan sebuah sikap dan komitmen untuk terus selalu berkinerja baik meningkatkan upaya pembangunan ekonomi di desa dengan salah satunya memanfaatkan keberadaan BUMDeS (Arindhawati & Utami, 2020).

- Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung sikap atau kecenderungan para pelaksana (disposisi) dalam pelaksanaan Program CEO BUMDes sudah baik dan optimal serta adanya dukungan penuh dari pimpinan daerah dalam setiap kegiatan atau program yang mengarah kepada pembangunan desa di Kabupaten Bandung (Murdiono & Amin, 2023).
- Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung kondisi lingkungan sosial ekonomi dan politik berjalan sangat kondusif sehingga implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa dapat dilaksanakan secara baik (Aldi et al., 2023). Hal ini dapat terjadi karena adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan daerah Kabupaten Bandung yaitu Bupati Bandung dalam upaya pembangunan desa

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi serta analisis yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dengan model teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 1) Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa belum berjalan secara optimal 2) Dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, ditemukan beberapa faktor penghambat yaitu masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia di desa, warga belum sepenuhnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola bisnis. Selain itu masih rendahnya dukungan dan partisipasi masyarakat serta koordinasi antarpemangku kepentingan yang masih kurang berjalan baik menyebabkan tidak tepat sasaran pembangunan ekonomi desa. Adapun faktor pendukung dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya pelaksanaan Program CEO BUMDes di Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung diantaranya dukungan pimpinan daerah di Kabupaten Bandung yang konsisten dan komitmen yang kuat dalam pembangunan ekonomi di desa melalui ketersediaan anggaran.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Wargaluyu Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung untuk mengatasi hambatan dalam Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa khususnya Program CEO BUMDes antara lain meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Program CEO BUMDes di desa, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat desa, memberikan pelatihan atau penyuluhan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat khususnya dalam proses bisnis atau kewirausahaan serta meningkatkan koordinasi antar stakeholders yang ada di desa dalam mewujudkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, M., Haidir, H., & Wicaksono, B. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Taman Sekanak Lambidaro Terhadap Aspek Ekonomi Sosial Dan Lingkungan Masyarakat Sekitar. Universitas Indo Global Mandiri.
- Alfiana, A., Mulatsih, L. S., Kakaly, S., Rais, R., Husnita, L., & Asfahani, A. (2023). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA EDUKASI DIGITAL DI ERA TEKNOLOGI. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7113–7120.
- Almeida, C. S. de, Miccoli, L. S., Andhini, N. F., Aranha, S., Oliveira, L. C. de, Artigo, C. E., Em, A. A. R., Em, A. A. R., Bachman, L., Chick, K., Curtis, D., Peirce, B. N., Askey, D., Rubin, J., Egnatoff, D. W. J., Uhl Chamot, A., El - Dinary, P. B., Scott, J.; Marshall, G., Prensky, M., ... Santa, U. F. De. (2016). MANFAAT LITERASI UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN. *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, 5(1), 1689–1699.
- Arabi, A. (2022). Situasi Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Perlis Di Kecamatan Berandan Barat Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan ...*, 2, 239–248.
- Ariadi, A. (2019). Bantu Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135–147.
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (studi pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa ponggok, tlogo, ceper dan manjungan kabupaten klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
- Arini, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Besar Kota Malang (Studi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Satuan Polisi Pamong Praja).
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143.

<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i1.3319>

- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, 2(1).
- Gea, I. V., Saleh, M., & Suharto, R. B. (2022). Peranan corporate social responsibility (CSR) terhadap tingkat pembangunan desa. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 18(3), 551–560. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i3.11545>
- Habibah, A. N., Ghafur, R. A., Anggraeni, E., & Malik, A. (2020). Peran kebijakan fiskal Islam dalam mengentas kemiskinan melalui program keluarga harapan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 251–258.
- Hussain, S., Ahonen, V., Karasu, T., & Leviäkangas, P. (2023). Sustainability of smart rural mobility and tourism: A key performance indicators-based approach. *Technology in Society*, 102287.
- Ismatulloh, K., Jamaluddin, J., Arianti, B. D. D., Wirasasmita, R. H., Kholisho, Y. N., Uska, M. Z., Kuswanto, H., Fathoni, A., & Lutfi, S. (2021). Gerakan Informatika Cerdas Berliterasi" berinovasi membangun peradaban di era 4.0 dengan budaya literasi". *ABSYARA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2(2), 301–310.
- Kamil, I. (2018). Komunikasi Kolaboratif dalam Pelestarian Kawasan Konservasi Hutan Kawah Kamojang Bandung. *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 02(01), 651–656.
- Kenedi. (2017). Pengembangan Kreativitas Siswa dalam Proses Pembelajaran di Kelas II SMP Negeri 3 Rokan IV Koto. *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Sains, Dan Humaniora*, 3(2), 329–348.
- Korain, F. X., Kaunang, M., & Egetan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Dana Otonomi Khusus bidang Pendidikan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. *Jurnal Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi*, V(086), 94–109.
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341.
- Listyorini, H., Supriyanto, S., Prayitno, P. H., & ... (2021). Penguatan Kelembagaan Pokdarwis Dalam Merintis Desa Wisata Melalui Penciptaan Identitas dan Kapabilitas Perencanaan Organisasi. *JMM (Jurnal ....*
- Madjidu, A., Usu, I., & Yakup, Y. (2022). Analisis Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi Dan Semangat Kerja Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai. *Jesya*

- (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 5(1), 444–462.
- Mujanah, S., Abdullah, L., Aulia Fijannah, E., Kaffi, A., & Baril Haq, C. (2022). Pengembangan desa Wisata 1001 Bunga untuk Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Lokal. Untag Surabaya Press.
- Murdiono, M., & Amin, M. (2023). Penerapan Pola Nabr Dan Tangim Dalam Meningkatkan Kemampuan Maharah Al-Kalam Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab Umm. Dharmakarya, 11(4), 328. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v11i4.32811>
- Permendes. (2020). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemendesa PDTT, 73.
- Pujiastuti, N., Reza, & Astuti, R. F. (2022). Pengaruh literasi ekonomi dan lingkungan sosial terhadap perilaku pembelian impulsif pada mahasiswa. Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi, 7(1), 107–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i1.6710>
- Ristanti, Y. D. (2015). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan, 2(2), 115–122.
- Ristantiya, S., Ardani, Y., & Hartanto, T. (2021). PKM Menjadikan BUMDesa Lempong Mandiri Sebagai Lembaga Usaha Desa yang Berkualitas. Jurnal Adimas, 1(2).
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., & ... (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. Owner: Riset Dan ..., 6, 3040–3049.
- Sekar Setyaningtyas, Indarmawan Nugroho, B., & Arif, Z. (2022). Tinjauan Pustaka Sistematis: Penerapan Data Mining Teknik Clustering Algoritma K-Means. Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang, 10(2), 52–61. <https://doi.org/10.21063/jtif.2022.v10.2.52-61>
- Sopah, F., Kusumawati, W., & Wahyudi, K. E. (2020). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Sidoarjo. Syntax, 2(6), 27.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26.
- Tay, D. S. R., & Rusmiwari, S. (2019). Implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP), 8(4), 217–222.